KOMPARASI HUKUM PERSELINGKUHAN DALAM PASAL 284 KUH PIDANA DAN HADITS RIWAYAT AHMAD

Zahra Davika Mulyani, Tajul Arifin

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email : zahradavikaa@gmail.com, tajularifin64@uinsgd.ac.id

Abstract

The aim of this research is to address the research question regarding the comparison between positive law and Islamic law in handling cases of adultery, particularly as regulated in Article 284 of the Criminal Code and the hadith narrated by Ahmad. The research method employed is literature analysis to gather and evaluate information from various relevant sources concerning both legal perspectives. The findings indicate differences in legal views, sanctions imposed, and moral considerations between Article 284 of the Criminal Code and the hadith narrated by Ahmad. However, similarities are also found in the significance of upholding the sanctity and integrity of the institution of marriage in both legal perspectives. The impact of this research is a more specific understanding of the differences and similarities between positive law and Islamic law in addressing cases of adultery. Furthermore, the research also suggests the importance of balancing the enforcement of positive law and religious values to strengthen the legal system and safeguard moral values in society.

Keywords: *Loyalty, legal comparison, marriage protection, and adultery*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian seputar perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam dalam menangani kasus perselingkuhan, khususnya yang diatur dalam Pasal 284 KUH Pidana dan hadits riwayat Ahmad. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis literatur untuk mengumpulkan dan mengevaluasi informasi dari berbagai sumber yang relevan terkait kedua perspektif hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan dalam pandangan hukum, sanksi yang diberikan, dan pertimbangan moral antara Pasal 284 KUH Pidana dan hadits riwayat Ahmad. Meskipun demikian, ditemukan juga kesamaan dalam pentingnya menjaga kesucian dan keutuhan institusi pernikahan dalam kedua perspektif hukum tersebut. Dampak dari penelitian ini adalah pengetahuan yang lebih khusus tentang perbedaan dan kesamaan antara hukum positif dan hukum Islam dalam menangani kasus perselingkuhan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pengaruh tentang perlunya keseimbangan antara penegakan hukum positif dan nilai-nilai agama untuk memperkuat sistem hukum dan melindungi nilai-nilai moral dalam masyarakat.

Kata Kunci: Kesetiaan, Perbandingan Hukum, Perlindungan Pernikahan, Dan Perselingkuhan

PENDAHULUAN

Perselingkuhan telah menjadi fokus perhatian dalam berbagai lapisan masyarakat sebagai sebuah fenomena sosial yang melintasi beragam budaya dan konteks sosial. Dalam bidang hukum, persoalan perselingkuhan sering kali memunculkan kompleksitas, terutama dalam upaya penegakan hukum dan penentuan sanksi bagi para pelaku. Di Indonesia, hukum perselingkuhan diatur dalam Pasal 284 KUH Pidana sebagai salah satu tindak pidana yang dapat dipidanakan. Namun, implementasi hukum terkait perselingkuhan seringkali dihadapkan pada tantangan interpretasi dan pemahaman yang rumit, khususnya dalam integrasi aspek-aspek hukum Islam ke dalam konteks hukum nasional.

Dari perspektif hukum positif, seperti yang diatur dalam Pasal 284 KUH Pidana di Indonesia, perselingkuhan dianggap sebagai tindakan pidana yang mendapat ancaman hukuman penjara. Pasal ini menegaskan bahwa perselingkuhan merupakan pelanggaran serius terhadap norma-norma moral dan hukum yang mengatur kesetiaan dalam pernikahan. Implikasinya adalah bahwa pelaku perselingkuhan dapat dikenai sanksi pidana yang meliputi hukuman penjara atau denda, tergantung pada keputusan pengadilan dan keparahan perbuatan yang dilakukan.

Sementara itu, dalam ajaran Islam, perselingkuhan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap ikatan pernikahan yang sakral. Kesetiaan dalam pernikahan merupakan salah satu nilai yang dijunjung tinggi dalam Islam, dan perselingkuhan dianggap sebagai tindakan yang merusak kesucian dan keutuhan rumah tangga. Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal menegaskan bahwa pelaku perselingkuhan tidaklah termasuk dalam lingkaran umat Muslim, menegaskan bahwa perselingkuhan adalah perbuatan yang sangat tidak diterima dalam Islam.

Dampak dari perselingkuhan tidak hanya dirasakan oleh pasangan yang terlibat, tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat secara luas. Perselingkuhan dapat menyebabkan ketidakstabilan emosional, keretakan dalam hubungan suami-istri, dan bahkan berujung pada perceraian. Selain itu, dampak sosial dan psikologis dari perselingkuhan dapat merusak norma-norma sosial dan budaya dalam masyarakat.

Perspektif hukum Islam, yang mencakup ajaran agama dan sumber-sumber hukum Islam, seperti hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, memberikan pandangan tersendiri terhadap perselingkuhan. Hadits-hadits tersebut memuat petunjuk dan aturan terkait penanganan perselingkuhan dalam masyarakat Muslim, dengan menekankan konsekuensi hukum serta pentingnya menjaga keutuhan keluarga dan masyarakat.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk melakukan sebuah komparasi antara hukum perselingkuhan yang diatur dalam Pasal 284 KUH Pidana dengan pandangan yang terdapat dalam hadits riwayat Ahmad.

Dengan melakukan perbandingan ini, diharapkan kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang perlakuan hukum terhadap perselingkuhan, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

Melalui perbedaan dan persamaan antara Pasal 284 KUH Pidana dan hadits riwayat Ahmad, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan diskusi yang lebih mendalam tentang perlindungan terhadap institusi pernikahan, serta pentingnya harmonisasi antara hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam dalam menangani kasus perselingkuhan. Oleh karena itu, kita dapat lebih memahami bagaimana hukum dapat berperan dalam menjaga stabilitas dan keadilan dalam masyarakat, terutama dalam hal perselingkuhan..

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan sebuah analisis perbandingan antara hukum perselingkuhan yang diatur dalam Pasal 284 KUH Pidana dengan pandangan yang terdapat dalam hadits riwayat Ahmad. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif, yang melibatkan pengamatan dan analisis atas ucapan atau tulisan manusia serta perilaku yang dapat diamati. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan seluruh data atau kondisi subjek atau objek penelitian, lalu melakukan evaluasi dan perbandingan dengan situasi saat ini untuk mencari solusi atas masalah yang ada serta memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapan lebih lanjut pada berbagai permasalahan.

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yang berarti peneliti tidak perlu mengumpulkan data secara langsung. Sumber data tersebut mencakup referensi dari publikasi ilmiah seperti jurnal, buku, dan sumber-sumber ilmiah lainnya yang membahas tentang hukum perselingkuhan dalam Pasal 284 KUH Pidana serta pandangan dalam hadits riwayat Ahmad. Analisis dilakukan terkait perbandingan esensi dari hukum perselingkuhan dalam Pasal 284 KUH Pidana dengan pandangan yang terdapat dalam hadits riwayat Ahmad, dengan fokus pada nilai-nilai hukum dan implikasi sosial yang terkandung dalam keduanya.

Saat menginterpretasikan teks hukum dalam Al-Qur'an, penting untuk memperhatikan asbab al-nuzul (sebab turun) dari ayat tersebut dengan baik.¹ Begitu pula ketika menangani teks hukum dalam bentuk Hadis, perlu dipertimbangkan dan dianalisis secara cermat berbagai aspek yang terkait dengan riwayat dan dirayah-nya.² Dalam proses reinterpretasi teks-teks hukum Islam untuk mencapai kemaslahatan dalam kehidupan sesuai dengan tujuan Syara', berbagai pendekatan dapat digunakan, asalkan tetap

¹ H. M. Federspiel, Tajul Arifin, dan R.T. Hidayat. *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1996).

² Tajul Arifin. *Ulumul Hadits* (Bandung: Sunan Gunung Djati Press, 2014).

mengaplikasikan epistemologi yang disetujui oleh mayoritas ulama. Menurut Tajul Arifin, keabsahan metode yang digunakan akan berpengaruh pada kesimpulan yang dihasilkan dari interpretasi tersebut.³

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perselingkuhan, sebagai perilaku yang melibatkan hubungan intim di luar pernikahan, telah menjadi fokus perhatian dalam ranah hukum, etika, dan sosial. Perilaku ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma moral dan hukum yang mengatur kesetiaan dan komitmen dalam hubungan suami-istri. Perselingkuhan adalah perilaku di mana seseorang yang telah menikah terlibat dalam hubungan romantis atau seksual dengan individu lain di luar pasangannya yang sah menurut norma-norma sosial dan hukum yang berlaku. Arti perselingkuhan menurut para ahli sering kali mencakup berbagai aspek psikologis, sosial, dan etika. Berikut adalah beberapa arti perselingkuhan menurut para ahli:

1. Dr. Shirley Glass

Beliau adalah seorang psikolog dan penulis yang mengkhususkan diri dalam studi tentang perselingkuhan, Glass mendefinisikan perselingkuhan sebagai "sebuah hubungan intim yang melibatkan sentuhan fisik, emosional, atau mental dengan individu lain yang tidak menjadi pasangan utama dalam hubungan romantis seseorang." Menurutnya, perselingkuhan tidak hanya tentang hubungan fisik, tetapi juga melibatkan perasaan dan koneksi emosional yang mendalam.

2. Dr. Esther Perel

Perel adalah seorang terapis perkawinan yang terkenal dengan penelitiannya tentang perselingkuhan, Perel menggambarkan perselingkuhan sebagai "kesempatan untuk menjadi seseorang yang berbeda." Baginya, perselingkuhan bisa menjadi bentuk ekspresi diri atau pencarian untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam hubungan utama.

3. Dr. Frank Pittman

Seorang psikiater dan penulis, Pittman melihat perselingkuhan sebagai "solusi yang tidak sempurna untuk masalah yang tidak terselesaikan dalam perkawinan." Baginya, perselingkuhan seringkali merupakan respons terhadap ketidakpuasan atau ketidakharmonisan dalam hubungan yang sudah ada.

³ Tajul Arifin. *Antropologi Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016).

4. Dr. Helen Fisher

Seorang antropolog yang telah melakukan penelitian tentang aspek biologis dari cinta dan hubungan, Fisher mengartikan perselingkuhan sebagai "refleksi dari kompleksitas neurobiologis dari perilaku manusia dalam hubungan romantis." Menurutnya, perselingkuhan bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor biologis seperti hasrat dan keinginan untuk variasi genetik.

5. Dr. Peggy Vaughan

Vaughan adalah seorang penulis dan ahli dalam studi tentang perselingkuhan, Vaughan mendefinisikan perselingkuhan sebagai "setiap bentuk pengkhianatan terhadap kesetiaan yang dijanjikan dalam sebuah komitmen." Baginya, perselingkuhan adalah pelanggaran terhadap kesepakatan yang dibuat dalam hubungan, baik itu berupa kesepakatan eksplisit maupun implisit.

Dari sudut pandang para ahli tersebut, perselingkuhan bukan hanya sekadar tindakan fisik, tetapi juga melibatkan aspek-aspek emosional, psikologis, dan sosial yang kompleks. Menurut para ahli diatas, terdapat beberapa alasan atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya perselingkuhan. Faktor-faktor tersebut bisa terjadi dalam hal psikologis, emosional, dan situasional, diantaranya yaitu:

1. Ketidakpuasan dalam Hubungan

Salah satu alasan utama orang selingkuh adalah ketidakpuasan dalam hubungan mereka. Hal ini bisa mencakup ketidakcocokan emosional, perbedaan kebutuhan atau harapan yang tidak terpenuhi, atau kekosongan dalam hubungan yang sudah ada. Ketidakpuasan bisa muncul dari berbagai aspek, termasuk kurangnya komunikasi, kesalahpahaman, atau perasaan terabaikan dalam hubungan. Ketika seseorang merasa hubungan mereka tidak memenuhi kebutuhan emosional atau psikologis mereka, mereka mungkin mencari pemenuhan di luar hubungan tersebut.

2. Kebutuhan Emosional yang Tidak Terpenuhi

Orang-orang mungkin mencari perasaan koneksi, penerimaan, atau dukungan emosional di luar hubungan utama jika mereka merasa kebutuhan ini tidak terpenuhi oleh pasangan mereka. Kehilangan ikatan emosional atau kurangnya perhatian dari pasangan bisa mendorong seseorang untuk mencari hubungan pengganti. Kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi itu dapat berupa perhatian, penerimaan, atau penghargaan.

3. Ketidakstabilan atau Kecelakaan dalam Kehidupan

Krisis atau perubahan besar dalam kehidupan seseorang, seperti stres pekerjaan, kesehatan yang buruk, atau konflik keluarga, bisa menjadi pemicu untuk mencari dukungan atau

penghiburan di luar hubungan utama. Ketika seseorang mengalami stres atau tekanan yang tinggi dari berbagai aspek kehidupan mereka, seperti masalah keuangan, kesehatan, atau pekerjaan, mereka mungkin mencari pelarian dari situasi tersebut melalui hubungan selingkuh yang memberikan kesenangan atau dukungan yang sementara.

4. **Hasrat Seksual**

Keinginan untuk variasi seksual atau eksplorasi seksual bisa menjadi alasan untuk selingkuh bagi beberapa orang yang merasa tidak puas secara seksual dalam hubungan mereka.

5. **Perasaan Terjebak atau Tidak Bahagia**

Beberapa orang mungkin merasa terjebak dalam hubungan mereka dan mencari kesenangan atau pemenuhan diri di luar hubungan tersebut sebagai cara untuk melarikan diri dari ketidakhahagiaan atau ketidakpuasan.

6. **Kesempatan dan Ketersediaan**

Faktor lingkungan atau situasional, seperti kesempatan untuk bertemu dengan orang baru di tempat kerja, di lingkungan sosial, atau melalui media sosial, bisa memperkuat hasrat untuk selingkuh jika tidak ada kontrol atau batasan yang efektif. Kadang-kadang, seseorang bisa terlibat dalam perselingkuhan hanya karena adanya kesempatan atau ketersediaan untuk berbuat demikian, seperti ketika mereka bertemu dengan seseorang yang menarik di lingkungan sosial atau pekerjaan mereka.

7. **Kurangnya Komunikasi dan Keterbukaan**

Kurangnya komunikasi yang efektif atau keterbukaan dalam hubungan bisa menyebabkan seseorang mencari koneksi atau pengertian di luar pasangan mereka. Ketika pasangan tidak secara efektif berkomunikasi atau tidak terbuka satu sama lain tentang kebutuhan, keinginan, atau masalah dalam hubungan, seseorang mungkin merasa terisolasi atau tidak dipahami, mendorong mereka untuk mencari hubungan yang lebih memuaskan secara emosional atau seksual.

8. **Tingkat Kematangan dan Kesadaran yang Rendah**

Beberapa orang mungkin kurang memiliki kemampuan untuk mengelola konflik, frustrasi, atau hasrat mereka dengan cara yang sehat dan dewasa. Mereka mungkin cenderung untuk merespons secara impulsif atau tidak mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari perilaku selingkuh.

Perselingkuhan merupakan tindakan yang dianggap melanggar norma-norma moral dan hukum yang mengatur kesetiaan dalam pernikahan. Dalam konteks hukum positif, perselingkuhan telah diatur secara spesifik dalam Pasal 284 KUH Pidana di Indonesia. Pasal ini

menggambarkan perselingkuhan sebagai perbuatan seseorang yang sudah menikah yang melakukan hubungan gelap dengan individu lain tanpa izin atau persetujuan dari pasangan resmi mereka. Dari perspektif hukum positif ini, perselingkuhan dinyatakan sebagai pelanggaran yang serius terhadap norma-norma yang mendasari institusi pernikahan.

Konsekuensi hukum dari perselingkuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP Pidana mencakup sanksi pidana bagi pelaku yang terbukti melakukan tindakan tersebut. Sanksi ini dapat berupa hukuman penjara atau denda, tergantung pada keputusan pengadilan dan keparahan dari tindakan perselingkuhan yang dilakukan. Tujuan dari sanksi ini adalah untuk menegakkan keadilan dan mempertahankan kesucian serta keutuhan institusi pernikahan.

Pasal 284 KUHP Indonesia merupakan landasan hukum yang mengatur tentang tindak pidana perselingkuhan, yang dikenakan pidana penjara paling lama 9 bulan. Ketentuan pasal ini sangat jelas menekankan bahwa perselingkuhan, baik dilakukan oleh pria maupun wanita yang telah menikah, merupakan pelanggaran serius terhadap norma-norma moral dan hukum yang mengatur kesetiaan dalam pernikahan. Dalam kasus perselingkuhan, pernikahan yang seharusnya menjadi ikatan yang sakral dan mengikat antara dua individu, terguncang dan terancam oleh tindakan yang merusak kepercayaan dan integritas keluarga.

Dari segi hukum positif, Pasal 284 KUHP menggariskan berbagai situasi yang dapat dikategorikan sebagai perselingkuhan. Misalnya, ketika seorang suami atau istri melakukan hubungan romantis atau seksual dengan individu lain tanpa izin atau persetujuan dari pasangan resmi mereka. Meskipun sudah diatur dalam Pasal 27 BW tentang perkawinan, tetapi perbuatan tersebut tetap dianggap melanggar hukum dan berpotensi mendapat sanksi pidana.

Selain itu, Pasal 284 KUHP juga mengatur tentang sanksi bagi pihak lain yang ikut serta dalam perbuatan perselingkuhan, bahkan jika mereka mengetahui bahwa pasangan yang terlibat juga sudah menikah. Tujuan dari hukuman ini adalah untuk menegakkan keadilan dan mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga kesetiaan dalam hubungan pernikahan.

Proses hukum terkait perselingkuhan memerlukan pengaduan dari pihak yang merasa terkena dampak langsung dari perbuatan tersebut, yaitu suami atau istri yang merasa tercemar. Namun, penuntutan hanya akan dilakukan jika bagi pelaku perselingkuhan berlaku pasal 27 BW tentang perkawinan. Pengaduan harus diajukan dalam jangka waktu tiga bulan, diikuti dengan permohonan bercerai atau pisah meja dan ranjang sebagai akibat langsung dari perselingkuhan yang terjadi.

Namun dalam proses pengaduan terhadap perselingkuhan, beberapa ketentuan pembuktian yang biasanya berlaku dalam hukum pidana tidak

akan diterapkan. Meskipun demikian, pengaduan dapat ditarik kembali sebelum proses pemeriksaan di pengadilan dimulai. Namun, jika pasal 27 BW berlaku bagi suami-istri yang terlibat, maka pengaduan tidak akan dipertimbangkan selama status perkawinan masih berlangsung, hingga ada putusan pengadilan yang menetapkan perceraian atau pisah meja dan ranjang secara resmi.

Sedangkan dalam ajaran Islam, perselingkuhan dianggap sebagai tindakan yang melanggar prinsip-prinsip moral dan agama yang sangat dijunjung tinggi. Kesetiaan dalam pernikahan merupakan salah satu nilai yang dipertahankan secara kuat dalam Islam, dianggap sebagai pondasi utama dari kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Perselingkuhan, dalam konteks ini, dianggap sebagai pengkhianatan terhadap ikatan suci pernikahan, yang seharusnya didasarkan pada komitmen, kasih sayang, dan saling menghormati antara suami dan istri. Dalam ajaran Islam, perselingkuhan diatur dalam beberapa hadits, salah satunya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal yang berbunyi:

مَنْ خَبَبَ عَبْدًا عَلَىٰ أَهْلِهِ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَىٰ زَوْجِهَا فَلَيْسَ مِنَّا

“Siapa yang menipu dan merusak (hubungan) seorang budak dengan tuannya, maka mereka bukanlah bagian dari kami. Dan siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya, maka dia bukanlah bagian dari kami.”

(HR: Ahmad, Ibnu Hibban, dan lain-lain)

Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal di atas memuat pesan yang sangat kuat dan penting terkait dengan implikasi dari perbuatan perselingkuhan dalam Islam. Maksud yang terkandung dalam hadits tersebut adalah memberikan peringatan yang tegas kepada umat Muslim tentang seriusnya persoalan perselingkuhan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan agama yang menjadi dasar utama dalam Islam. Dengan menyatakan bahwa pelaku perselingkuhan tidaklah termasuk dalam lingkaran umat Muslim, hadits ini menegaskan bahwa perselingkuhan merupakan perbuatan yang dianggap sangat tidak diterima dan tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Hadits ini tidak hanya membahas betapa seriusnya pelanggaran perselingkuhan dalam Islam, tetapi juga mengingatkan umat Muslim akan konsekuensi yang mungkin akan dihadapi oleh pelaku perselingkuhan. Dengan menegaskan bahwa mereka yang terlibat dalam perselingkuhan tidaklah menjadi bagian dari komunitas Muslim, hadits ini memberikan sebuah panggilan yang jelas untuk menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nilai-nilai moral dan agama yang dijunjung tinggi dalam Islam.

Hadits ini juga menyiratkan pentingnya menjaga kesucian dan keutuhan rumah tangga dalam masyarakat Muslim. Dengan menekankan

bahwa perbuatan perselingkuhan dapat mengganggu hubungan yang seharusnya didasarkan pada kesetiaan dan kasih sayang antara suami dan istri, hadits ini menegaskan bahwa menjaga stabilitas keluarga dan masyarakat adalah tanggung jawab yang sangat penting dan harus dipikul bersama antara suami dan istri.

Kesetiaan dalam pernikahan menjadi fondasi yang penting dalam pembentukan dan pemeliharaan hubungan yang sehat dan harmonis antara pasangan suami dan istri. Perselingkuhan tidak hanya merusak hubungan antara suami dan istri, tetapi juga dapat memiliki dampak yang luas pada keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini karena perselingkuhan membawa konsekuensi yang merugikan, seperti ketidakstabilan emosional, keretakan keluarga, dan bahkan terkadang berujung pada perceraian.

Hadits ini menjadi dalil yang memperkuat pentingnya memahami dan mematuhi nilai-nilai moral dan agama dalam menjalani kehidupan berumah tangga dalam ajaran Islam. Dengan menolak perselingkuhan dan menegakkan kesetiaan dalam pernikahan, umat Muslim diharapkan dapat membangun hubungan yang kokoh, harmonis, dan bermakna dalam masyarakat yang diatur oleh nilai-nilai Islam.

Dalam konteks Pasal 284 KUH Pidana, dampak buruk perselingkuhan tercermin dalam ancaman pidana yang dikenakan terhadap pelakunya. Pelanggaran terhadap norma kesetiaan dalam pernikahan, sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, dapat mengakibatkan hukuman penjara paling lama 9 bulan. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh pelaku perselingkuhan, tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat secara luas, karena menciptakan ketidakstabilan emosional dan keretakan dalam hubungan pernikahan. Hal ini berarti perbuatan perselingkuhan tidak hanya merusak ikatan suci antara suami dan istri, tetapi mengancam stabilitas rumah tangga dan kehidupan sosial dalam bermasyarakat.

Sementara itu, dalam hadits riwayat Ahmad, dampak buruk perselingkuhan ditekankan dalam konteks moral dan agama. Perselingkuhan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap nilai-nilai agama dan moralitas yang dijunjung tinggi dalam Islam. Pelaku perselingkuhan, menurut hadits tersebut, tidak dianggap sebagai bagian dari umat Muslim. Hal ini menegaskan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam dan dapat merusak keutuhan rumah tangga serta keharmonisan dalam masyarakat. Oleh karena itu, perselingkuhan tidak hanya merugikan bagi individu, tetapi juga merugikan keluarga dan masyarakat.

Dalam pandangan Islam, terhindar dari perbuatan selingkuh membutuhkan kesadaran dan tindakan yang kuat dalam menjaga kesucian hubungan pernikahan. Berikut adalah beberapa hal yang harus dihindari agar terhindar dari selingkuh menurut pandangan Islam:

1. Menjaga kesetiaan

Kesetiaan adalah fondasi utama dalam pernikahan menurut ajaran Islam. Ini melibatkan komitmen untuk tetap setia kepada pasangan hidup dan menghindari terlibat dalam hubungan yang melanggar ikatan pernikahan karena pada hakikatnya pernikahan dalam Islam merupakan ibadah sepanjang hayat yang tujuannya untuk menyempurnakan separuh agama.

2. Meningkatkan komunikasi antara suami dan istri

Komunikasi yang terbuka dan jujur antara suami dan istri sangat penting dalam mencegah timbulnya ketidakpuasan atau konflik yang dapat memicu selingkuh. Dengan berbicara secara terbuka tentang perasaan dan kebutuhan masing-masing, pasangan dapat saling memahami dan menyelesaikan masalah dengan baik.

3. Bertawakkal kepada Allah

Mengamalkan ajaran Islam secara konsisten membantu memperkuat iman dan kesadaran akan batasan moral yang ditetapkan oleh agama. Ini mencakup menjalankan ibadah secara teratur, membaca Al-Qur'an, dan memperkuat hubungan spiritual dengan Allah.

4. Menghindari situasi yang berisiko

Menjauhi situasi atau lingkungan yang berpotensi membuka peluang untuk terlibat dalam selingkuh merupakan langkah preventif yang penting. Ini termasuk menghindari pertemuan atau interaksi pribadi dengan lawan jenis di tempat-tempat yang terisolasi atau intim. Dalam ajaran Islam hal ini disebut dengan khalwat, dan sangat tidak diperbolehkan bagi dua insan yang bukan mahram.

5. Menjaga batasan dengan yang bukan mahram

Menetapkan batasan yang jelas dalam interaksi dengan lawan jenis di luar pernikahan adalah upaya penting untuk mencegah selingkuh. Ini mencakup menghindari percakapan atau perilaku yang dapat menimbulkan ketertarikan atau ketidaknyamanan dalam hubungan.

6. Mendukung dan menghormati pasangan

Menunjukkan penghargaan, cinta, dan dukungan kepada pasangan adalah cara yang efektif untuk memperkuat ikatan emosional dan mengurangi risiko ketidakpuasan dalam hubungan. Mendukung pasangan dalam setiap aspek kehidupan juga penting untuk menjaga keharmonisan dalam pernikahan. Karena pada hakikatnya dalam Islam, seorang istri adalah ratu yang harus dimuliakan oleh suaminya.

7. Memahami konsekuensi di dunia dan akhirat

Memahami konsekuensi serius dari selingkuh, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat, membantu seseorang menyadari pentingnya menjaga kesetiaan dalam pernikahan. Kesadaran akan dampak negatif yang mungkin timbul dari tindakan selingkuh dapat menjadi dorongan kuat untuk tetap setia dan menjauhi godaan yang merusak hubungan.

Dalam melakukan perbandingan antara Pasal 284 KUH Pidana dan hadits riwayat Ahmad, terdapat beberapa aspek dapat diperhatikan, termasuk diantaranya pandangan hukum, sanksi yang dikenakan, pertimbangan moral, dan implikasi sosial serta budaya.

Mulai dari pandangan hukum, Pasal 284 KUH Pidana menangani perselingkuhan sebagai tindak pidana yang mendapat ancaman hukuman penjara, sementara hadits riwayat Ahmad memandangnya sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan agama dalam Islam. Perbedaan ini mencerminkan pendekatan yang berbeda antara hukum sekuler dan hukum berbasis agama.

Sanksi yang diberikan juga berbeda, di mana Pasal 284 KUH Pidana memberikan sanksi pidana penjara, sementara hadits Ahmad tidak secara eksplisit memberikan sanksi hukum, tetapi menegaskan konsekuensi moral yang berat. Hal ini menunjukkan perbedaan dalam pemahaman tentang penanganan pelaku perselingkuhan.

Dari segi pertimbangan moral, Pasal 284 KUH Pidana mencerminkan pandangan moralitas yang diatur dalam hukum positif, sementara hadits Ahmad merujuk pada prinsip-prinsip moral dan agama dalam Islam. Perbandingan ini mengungkapkan perbedaan perspektif antara hukum positif dan nilai-nilai agama dalam menangani kasus perselingkuhan.

Terakhir, implikasi sosial dan budaya dari perbedaan pendekatan hukum dapat memengaruhi norma-norma sosial dan budaya masyarakat. Implementasi hukum positif dan nilai-nilai agama dalam menangani perselingkuhan dapat memiliki dampak yang signifikan pada dinamika masyarakat secara keseluruhan.

SIMPULAN

Secara garis besar, perbandingan antara Pasal 284 KUH Pidana dan hadits riwayat Ahmad menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam menangani kasus perselingkuhan. Pasal 284 KUH Pidana lebih menekankan aspek hukum sekuler dengan fokus pada sanksi pidana, sementara hadits riwayat Ahmad menyoroti implikasi moral dari perselingkuhan dalam ajaran Islam. Perbedaan ini menggambarkan tantangan dalam mengintegrasikan hukum positif dengan nilai-nilai agama dalam penegakan hukum.

Sementara hukum positif cenderung mengutamakan penegakan hukum dan sanksi, ajaran agama menekankan nilai-nilai moral dalam menjaga keutuhan keluarga. Oleh karena itu, dalam menangani

perselingkuhan, diperlukan keseimbangan antara penegakan hukum dan pemahaman akan nilai-nilai agama yang dijunjung tinggi.

Perbandingan ini juga menekankan pentingnya harmonisasi antara hukum positif dan nilai-nilai agama untuk memperkuat sistem hukum dan melindungi institusi pernikahan. Dengan memahami perbedaan dan kesamaan antara kedua perspektif ini, kita dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap nilai-nilai moral dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarta, I. Gede. "Pasal 284 kitab undang-undang hukum pidana sebagai dasar penyidikan dan penuntutan perbuatan perselingkuhan (overspel)." *Lex Administratum* 5, no. 2 (2017).
- Dison, Ronal, and Hermanto Hermanto. "Upaya Pemerintah Desa Dalam Proses Penyelesaian Hukum Adat Perselingkuhan Suami Istri Bagi Kehidupan Sosial Masyarakat." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6, no. 3 (2022).
- Effendy, Muhammad Amin, Lamrony Putra Sianturi, Dudung Mulyadi, Iwan Setiawan, and Doni Cakra Gumilar. "PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN PASAL 284 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA." *Pustaka Galuh Justisi* 1, no. 1 (2021).
- Emilson, Nur Husni, Yudistira Rusydi Rusydi, Reny Okpirianty Okpirianty, Febrina Hertika Rani, and Hasanul Mulkan Mulkan. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Zina (Suami/Istri Selingkuh)." *Suluh Abdi* 4, no. 2 (2023): 78- 85.
- H. M. Federspiel, Tajul Arifin, dan R.T. Hidayat. *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1996).
- Hadi, Saiful. "Ketentuan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina dalam KUHP dan Qanun Hukum Jinayat." PhD diss., UIN Ar-Raniry, 2022.
- Hadziq, Sahran. "Pengaturan tindak pidana zina dalam KUHP dikaji dari perspektif living law." *Lex Renaissance* 4, no. 1 (2019): 25-45.
- Indira Larasati, Indira Larasati. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DISEBABKAN PERSELINGKUHAN MELALUI MEDIA SOSIA." PhD diss., INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO, 2021.
- Islam, Hukum Jurusan Hukum Publik. "ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PASAL 483 RANCANGAN KONSEP KUHP TAHUN 2012 TENTANG ZINA."
- Jotley, Petrus Ricardo, Elsa Rina Maya Toule, and Sherly Adam. "Penyelesaian Kasus Perselingkuhan Melalui Sanksi Pidana Adat Di Kecamatan Pulau Wetang." *LUTUR Law Journal* 3, no. 2 (2022): 65-76.
- Maulana, Iqbal. "ZINA DALAM PERSPEKTIF DUALISME HUKUM PIDANA (Telaah Defenisi, Sanksi dan Alat Bukti Terhadap Qanun Jinayat dan KUHP)." PhD diss., UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Muhajarah, Kurnia. "Perselingkuhan suami terhadap istri dan upaya penanganannya." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 1 (2017): 23-40.
- Nasrullah, Nasrullah, and Rustam Rustam. "Upaya Penyidik Mengungkap Perselingkuhan Dengan Dugaan Perzinahan (Studi Kasus Polsek Patilaggio)." *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2023): 73-82.
- NINGRUM, ANISSA DJUARNI SITI. "EKSISTENSI HAM DALAM TINDAK PIDANA PERZINAAN PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL

- DAN HUKUM ISLAM (Analisis Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP)." Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Novitasari, Erica Dian. "Analisis sistem hukum zina dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 01 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana perspektif fiqh jinayah." PhD diss., IAIN Kediri, 2023.
- Putra, Dayu. "Pembuktian Tindak Pidana Zina Di Dalam Pasal 284 KUHP Berdasarkan Bukti Petunjuk." (2020).
- Rizki, Kurnia Dewi. "Analisis Yuridis Pasal 284 KUHP Tentang Delik Perzinaan Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam." PhD diss., Universitas Islam Riau, 2018.
- Ronaldison, Ronaldison, and Hermanto Hermanto. "Upaya Pemerintah Desa Dalam Proses Penyelesaian Hukum Adat Perselingkuhan Suami Isteri Bagi Kehidupan Sosial Masyarakat (Studi Pada Lembaga Adat Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo)." *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah* 4, no. 1 (2022): 138-163.
- Sobari, Ahmad. "Kesalahan Pengertian Terminologi Zina (Overspel) Dalam KUHP." *National Journal of Law* 1, no. 1 (2019).
- Tajul Arifin. *Ulumul Hadits* (Bandung: Sunan Gunung Djati Press, 2014).
- Tajul Arifin. *Antropologi Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016).